

ABSTRAK

PENGELOLAAN KOMPENSASI GURU BANTU (Studi Analisis Pengelolaan Kompensasi Guru Bantu Pada Sekolah Menengah Atas Negeri Di Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan)

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran secara empirik mengenai pengelolaan kompensasi Guru Bantu pada Sekolah Menengah Atas negeri di Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan. Penelitian ini membahas mengenai bentuk dan jenis kompensasi yang diterima, sumber kompensasi, mekanisme pemberian kompensasi, kendala-kendala yang dihadapi dalam pengelolaan kompensasi serta kinerja Guru Bantu.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif. Adapun metode yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah wawancara, observasi dan studi dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan kompensasi Guru Bantu pada Sekolah Menengah Atas Negeri di Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan masih kurang efektif. Indikatornya adalah: (1) kompensasi yang diterima belum dapat memenuhi kebutuhan hidup dasar (sandang, pangan dan papan). (2) Kompensasi yang diterima belum adil. (3) Mekanisme pemberian kompensasi masih menyulitkan dan tidak tepat waktu. (4) Bentuk dan jenis kompensasi kurang bervariasi.

Bentuk kompensasi yang diterima Guru Bantu dari sekolah antara lain insentif kelebihan mengajar, wali kelas, pembina kegiatan ko/ekstra kurikuler, transport, piket guru, membuat soal ujian, mengawas ujian, mengoreksi lembar jawaban, sebagai panitia, rumah dinas, pakaian dinas, THR, diklat/penataran, kesempatan memperoleh tambahan penghasilan, menggunakan fasilitas sekolah, kemudahan melakukan pinjaman, cuti, pujian, senyuman, salam, sapa, dan persahabatan.

Untuk kompensasi berupa honorarium dananya bersumber dari Pemerintah Pusat. Kemudian insentif dan kompensasi lainnya berasal dari dana komite sekolah. Sedangkan kompensasi nonmoneter bersumber dari kepala sekolah, guru PNS, siswa dan masyarakat. Mekanisme pemberian kompensasi dari Pemerintah Pusat disalurkan melalui rekening masing-masing Guru Bantu, sedangkan kompensasi dari komite sekolah, kepala sekolah guru PNS, dan siswa dilakukan secara langsung. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pengelolaan kompensasi adalah terbatasnya dana yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Sekolah. Walaupun dengan jumlah kompensasi yang terbatas, namun Guru Bantu tetap menunjukkan kinerja yang cukup baik. Ini dipicu dari keinginan Guru Bantu untuk diangkat menjadi PNS.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat direkomendasikan bahwa: (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan honor tambahan kepada Guru Bantu. (2) Pemerintah, sekolah dan masyarakat menggali sumber-sumber baru bagi pembiayaan pendidikan khususnya untuk kesejahteraan Guru Bantu. (3) Pemerintah membuat mekanisme penyaluran honorarium khusus kepada Guru Bantu di Daerah terpencil. (4) Pemerintah, Sekolah dan masyarakat bersama-sama mencari jalan keluar untuk memecahkan persoalan pengelolaan kompensasi Guru Bantu. (5) Pemerintah menindaklanjuti hasil penilaian kinerja dengan mengangkat Guru Bantu yang memiliki kinerja yang cukup baik.